

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bastian, Indra. 2008. *Akuntansi Kesehatan*. Jakarta: Erlangga.
- Black, Henry Campbell. 1991. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition. U.S.A.: West Publishing.
- ELSAM. 2014. *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pusat Dokumentasi ELSAM.
- Gemala R. Hatta, 2013, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*, UI-Press, Jakarta.
- Gunawan. 1991. *Memahami Etika Kedokteran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1998. *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lumenta, Benyamin, dkk. 1989. *Peran dan Perilaku*. Jakarta: Kanisius.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2002. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Purbacaraka, P. & Soekanto, S. 1986. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Sadjijono. 2016. *Hukum antara Sollen dan Sein*. Surabaya: Ubhara Press.

Soekanto, Soerjono, dkk. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Triwibowo, Cecep. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Thorndike, R. L. & Hagen, E. E. 2011. *Measurement and Evaluation in Psychology and Education*. New York.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5256).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Obat dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan.

Jurnal

- Aditya, Z. F. & Winata, M. R. t.t. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Negara Hukum*. (daring).
- Agiwahyunto, F., dkk. 2016. "Upaya Pencegahan Perbedaan Diagnosis Klinis dan Diagnosis Asuransi dengan Diberlakukannya Program JKN dalam Pelayanan BPJS Kesehatan (Studi di RSUD Kota Semarang)." *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*. (daring).
- Alvianitasari, E. F. 2018. "Evaluasi Pelaksanaan Sistem Verifikasi di Kantor (Vedika) BPJS Kesehatan di RS Panti Rahayu Purwodadi." *Visikes*, 18(2): 7.
- Disantara. 2021. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum (Legal Modernization)." *Al-Adalah*, 18(1): 22.
- D. Leonard, 2020, "Sosialisasi Pelaksanaan Sistem INA-CBGs di Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 2.
- Kurniawati, S. 2023. "Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Hukum Kesehatan di Indonesia." *J-Innovative*, 3(04): 1–13.
- Leonard, D. 2020. "Sosialisasi Pelaksanaan Sistem INA-CBGs di Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Abdidas*, 1(6): 5.
- Nadira, C. S. 2023. "Kedudukan Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Mercatoria*, 16(1): 15.
- Naurah, G. 2025. "Perlindungan Hukum Pasien dari Tindakan Malpraktik menurut Hukum Kesehatan di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02): 27.
- N. Budiyantri, 2022, "Analisis Perbedaan Struktur Dasar ICD-10 dan ICD-11", *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, Vol. 13
- Panggabean, E. J. M. R. & Hidayat, M. 2024. "Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik melalui Mediasi dan Peran MKDKI." *Journal of Islamic, Civilization, and Nusantara*, 2(10): 14.
- Putri, R. S. E. 2024. "Sosialisasi Pelaksanaan Sistem INA-CBGs." *Jurnal Abdimas Saintika*. (daring).
- Robert Jakob, dkk., 2020, "ICD-11: A Scientific Asset for Public Health", *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 17 No. 1

R. Perwirani, 2025, "Challenges, Benefits and Considerations of Transitioning from ICD-10 to ICD-11", *Journal of Public Health and Epidemiology*, Vol. 12 No. 1

Wahyati, Endang. 2019. "Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1): 67–82. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.692>

Wahyati, Endang. 2019. "The Right to Self-Determination in Health Services and the Mandated Health Insurance Program for Universal Health Coverage." *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 8(5): 325–337.

World Health Organization, 2016, *ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 2 Instruction Manual*, WHO Press, Geneva.

Wuisan, D. R. 2025. "Kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Medis Dokter dan Pasien." *Lex Privatum*, 13(1).

Yuditia. 2023. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS: Suatu Tinjauan Yuridis." *Jurnal Supremasi*, 8(2): 14.

Sumber Daring

Alodokter/Alomedika. 2023, 16 Oktober. "Pentingnya Clinical Pathway bagi Fasilitas Kesehatan." Diakses 9 November 2025, dari <https://alomedika.com>

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 2024. "Pengajuan Klaim INA-CBG Butuh Pengkodean Diagnosis yang Tepat." Diakses 9 November 2025, dari <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

BPJS Kesehatan. 2018. "Hak dan Kewajiban." Diakses 9 November 2025, dari <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2017/27>

Dandapala. t.t. "Inform Consent dalam Tindakan Medis sebagai Hak Pasien." Diakses 9 November 2025, dari <https://dandapala.com>

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). 2024. *Press Release* terkait Perpres Nomor 59 Tahun 2024. Diakses 9 November 2025, dari <https://djsn.go.id>

Hukumonline. t.t. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." Diakses 9 November 2025, dari <https://hukumonline.com>

- Jurnal Kesehatan Tambusai. 2021. "Analisis Tarif RS dan INA-CBGs Kasus *Sectio Caesarea,*" 2(3): 28. Diakses 9 November 2025, dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id>
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. "INA-CBG's untuk Optimalkan Pelayanan BPJS Kesehatan." Diakses 9 November 2025, dari <https://kemkes.go.id>
- Kompasiana. 2018, 27 Mei. "Vedika, Solusi atas Tunggakan Klaim dari BPJS." Diakses 9 November 2025, dari <https://kompasiana.com>
- KBBI Daring. t.t. Entri "diagnosis." Diakses 9 November 2025, dari <https://kbbi.web.id/diagnosis>
- Liputan6.com. 2018, 25 April. "Mulai Mei, BPJS Kesehatan Terapkan Verifikasi Klaim Digital." Diakses 9 November 2025, dari <https://liputan6.com>
- Portalhukum.id. 2025, 4 Januari. "Teori Hierarki Norma Hukum." Diakses 9 November 2025, dari <https://portalhukum.id>
- Rangkuman Permenkes No. 26 Tahun 2021. t.t. Diakses 9 November 2025, dari <https://id.scribd.com>
- R. A. Siregar. 2025. "Sebuah Paradigma Baru dalam Hukum Kesehatan Indonesia." Diakses 9 November 2025, dari <https://repository.uki.ac.id>
- Syedza Saintika Journal (halaman jurnal). Lihat: Putri, R. S. E. (2024). Diakses 9 November 2025, dari <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id>
- Undip E-Journal (Notarius). Lihat: A. C. E. Pratama. Diakses 9 November 2025, dari <https://ejournal.undip.ac.id>
- Universitas Nusa Mandiri Repository. Lihat: I. Ananta. "Penerapan Pola Pembayaran INA-CBGs BPJS Kesehatan." Diakses 9 November 2025, dari <https://repository.nusamandiri.ac.id>
- e-Jurnal Stikes Kesdam Udayana. t.t. "Perbandingan Tarif Rumah Sakit dan INA-CBG Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2." Diakses 9 November 2025, dari <https://ejurnalstikeskesdamudayana.ac.id>
- Hukum, Islam, Civilization, and Nusantara (JICNusantara). t.t. "Pengaturan Hak dan Kewajiban Pasien dalam Sistem Hukum Kesehatan Indonesia." Diakses 9 November 2025, dari <https://jicnusantara.com>
- Forikami Journal. t.t. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon." Diakses 9 November 2025, dari <https://journal.forikami.com>
- BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. t.t. "Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan (Endang Sumiarni, kutipan)." Diakses 9 November 2025, dari <https://sultra.bpk.go.id>

YouTube. t.t. “Sosialisasi Permenkes 26 Tahun 2021 tentang Pedoman INA-CBGs.” Diakses 9 November 2025, dari <https://youtube.com>

